

**DAMPAK IMPLEMENTASI PENANGANAN AKSES REFORMA  
AGRARIA DI KALURAHAN BANGUNKERTO,  
KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:  
**LEONARDUS ENRICO VINDY YUDHA KUSUMA**  
NIT. 19283215

Dosen Pembimbing I : M. Nazir Salim, S.S., M.A.  
Dosen Pembimbing II : Rohmat Junarto, S.ST., M.Eng  
Dosen Pembahas : Sudibyanung, S.SiT., M.Si.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

*The Sleman Regency Land Office carried out Agrarian Reform Access activities in Bangunkerto Village. The program presented is access arrangement or Access Reform where the community is given the opportunity to access capital and other assistance to agrarian reform subjects in order to improve welfare based on land use. The purpose of this research is to find out the community's implementation of the Agrarian Reform Access program and to find out the sustainable resource management in Bangunkerto Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, which provides a clear picture of the implementation of Agrarian Reform Access as an implementation step for structuring access in Bangunkerto Village. Data was collected through interviews with resource persons, field observations, and literature studies. The results of the research are 1) The impact of community land empowerment in Bangunkerto Village, 2) Community constraints in developing UMKM and Fishery Cultivators, 3) Role model of the potential for community economic development of UMKM and Fish Cultivators.*

**Keyword:** access arrangement, society implementation, agrarian reform

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT .....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Literatur .....	11
B. Kerangka Teoritis .....	13
1. Implementasi Penanganan Akses Reforma Agraria .....	13
2. UMKM dan Budidaya Perikanan .....	14
3. Model Akses Reforma Agraria.....	16
4. Akses Reforma Agraria.....	19
C. Kerangka Pemikiran .....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Format Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	27
1. Jenis Data .....	27
2. Sumber Data.....	27
D. Penentuan Informan dan Teknik Pengumpulan Data .....	28
1. Informan.....	28
2. Teknik Pengumpulan data.....	29
E. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan .....	29

1. Data lapangan dan hasil wawancara .....	31
2. Pengertian Data .....	31
3. Membaca Keseluruhan Teks .....	31
4. Koding dan Klasifikasi .....	31
5. Deskripsi, Pola, dan Tema .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN KALURAHAN BANGUNKERTO .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Kalurahan Bangunkerto.....	33
B. Penjelasan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto.....	37
C. Tujuan dan Manfaat ARA di Kalurahan Bangunkerto .....	43
D. Inovasi ARA di Kalurahan Bangunkerto.....	45
<b>BAB V IMPLEMENTASI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA .....</b>	<b>48</b>
A. Dampak Kegiatan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi.....	48
B. Kendala Masyarakat dalam pengembangan UMKM dan Pembudidaya Perikanan 61	
C. Role Model Penanganan Akses Reforma Agraria .....	68
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Implementasi kegiatan reforma agraria dengan pelaksanaan yang memenuhi aturan serta sesuai koridor yang tertera maka dapat dinilai berhasil (Shafrina, 2022). Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut dapat berwujud program, kebijakan atau kegiatan yang berupaya menyukseskan serta memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat

Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan pengembangan UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki daya tarik pasar ekspor sektor pertanian sebesar USD 380 juta pada Maret 2023. Pada sektor UMKM, berkontribusi di atas 61% terhadap total produk domestik bruto (PDB) atau Rp19.588,4 triliun dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja domestik. Namun demikian, UMKM hanya berkontribusi sekitar 14 persen terhadap total ekspor Indonesia, jauh lebih rendah dibandingkan rasio yang terlihat pada negara-negara lain. Misalnya, di Singapura, UMKM menyumbang 41 persen ekspor negara itu, sedangkan di China UMKM menyumbang 60 persen ekspor. Oleh karena itu, usaha untuk mengembangkan sektor pertanian dan UMKM akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta keberhasilan ekonomi suatu daerah (Wilfarda, 2021).

Persaingan ketat dalam UMKM untuk menghadapi arus kencang dibutuhkan inovasi, kreasi, dan teknologi serta membesarkan pasar (Sedyastuti, 2018). Selain itu, berbagai tantangan global berupa masuknya merek dagang asing yang akan mengganggu ketahanan UMKM lokal ikut menjadi penghambat berkembangnya UMKM lokal. Umumnya, pengusaha mikro, kecil tidak bisa naik tangga ke pengusaha menengah karena sejumlah masalah. Terutama dalam hal mendapatkan uang dari bank dan bantuan pendampingan dari orang lain. Sering kali, lembaga keuangan resmi tidak melihat potensi usaha mikro dan kecil karena mereka tidak cukup tahu tentang keunggulan produknya. Selain itu, sulit bagi pengusaha mikro

dan kecil untuk melakukan pemeriksaan perbankan karena sistem pelacakan mereka tidak terlalu baik, sehingga informasinya tidak selalu sama ketika dibutuhkan oleh pihak bank. Kemudian pihak bank atau pihak ketiga lainnya tidak dapat melihat produk barang secara keseluruhan, dan pelaku usaha tersebut tidak dapat memberikan informasi yang sebenarnya dibutuhkan. Padahal, pembiayaan dan bantuan sangat penting bagi pelaku UMKM yang ingin menurunkan biaya produknya dan menjangkau pasar yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengembangkan potensi UMKM di Indonesia agar mampu bersaing dengan produk asing.

Pemerintah Indonesia telah dan sedang menggalakkan “cinta produk Indonesia” guna mendukung usaha lokal maupun UMKM agar dapat bersaing dengan merek dagang asing. Kementerian Koperasi dan UMKM telah dan sedang melaksanakan program bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM untuk menggunakan aset tanah yang telah terdaftar sebagai jaminan oleh pihak bank. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menghadirkan program Akses Reforma Agraria/ARA. ARA sebagai metode pemberdayaan masyarakat berbasis tanah setelah penerbitan sertifikat tanah atau legalisasi aset yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan sekitar. Kepemilikan tanah yang telah berlegalitas dalam bentuk sertifikat merupakan upaya awal implementasi Akses Reforma Agraria yang dapat menjadi aset hidup yang dapat dijadikan modal awal bagi masyarakat memiliki kepastian hukum.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan adanya bantuan dari pemerintah dan *stakeholder* terkait melalui keinginan masyarakat berusaha dan masyarakat memiliki keinginan untuk mengubah budaya kerja dan etos kerja, sehingga dapat tercapai apa yang di maksud dengan kesejahteraan. Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria juga memberikan kesempatan dan menggali potensi ekonomi pada masyarakat untuk mendapatkan akses yang berbasis pada pemanfaatan tanah. *Start* awal oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah dimulai dengan program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan cara pendayagunaan tanah, baik melalui kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM jasa, dan kerajinan atau wisata. PTM merupakan hal dimana masyarakat bersama dengan *stakeholder* terkait dapat bersinergi dalam memberikan daya terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan (Hamid, 2018).

Selanjutnya, tahapan kegiatan Akses Reforma Agraria yakni mulai dari penetapan lokasi, perekrutan *field staff*, penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model pemberdayaan, pendampingan, monitor dan evaluasi serta pelaporan akhir. Penentu awal sukses atau gagalnya Akses Reforma Agraria adalah Pemetaan Sosial. Pemetaan sosial dilaksanakan dengan pengumpulan data atau informasi terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk menemukan potensi usaha, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi pemberdayaan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2021, Pemetaan Sosial (*social mapping*) merupakan kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap satu lokasi yang ditetapkan sebagai kegiatan penataan akses dan aset. *Field Staff* kantor pertanahan melaksanakan pemetaan sosial yang ada di lokasi kegiatan PTM dengan mengidentifikasi dan memahami struktur sosial, ekonomi, dan budaya (sistem kelembagaan dan individu). Teknik ini dilakukan secara akademik melalui suatu penilaian di lapangan, yakni mengumpulkan data secara langsung, menginterpretasikannya berdasarkan data yang teranalisis.

Penanganan ARA juga merupakan satu inovasi baru dalam peningkatan pemanfaatan nilai tanah untuk kesejahteraan masyarakat pasca penataan aset dengan membentuk ekosistem akses bersama yang biasa disebut *multi-stakeholder*. Hal tersebut diwujudkan dengan keterlibatan dialog kolaborasi yang membangun dan memiliki karakter sukarela, diwujudkan dalam kerja sama sektor publik, masyarakat, dan swasta (Amin, 2022).

Saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah dan sedang melaksanakan kegiatan PTM di Kapanewon Turi, Kalurahan Bangunkerto. Umumnya, kegiatan PTM tersebut berfokus pada sektor UMKM dan pembudidayaan ikan air tawar. Kalurahan Bangunkerto menjadi salah satu kalurahan di kapanweon

tersebut yang berhasil menjalankan PTM. Sebab, Kalurahan Bangunkerto memiliki beragam potensi perkebunan buah salak yang sangat melimpah di samping budidaya perikanan air tawar.

Komoditas salak khususnya dan budidaya perikanan air tawar memang sudah diakui masyarakat lokal hingga mancanegara sebagai komoditas yang mampu di pasarkan hingga ke luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat bersama Kantor Pertanahan Sleman memiliki kesadaran untuk melakukan pengembangan dan peningkatan komoditas. Bahkan, masyarakat menginginkan adanya varian jenis salak baru yang prospektif untuk ditanam agar ketika panen raya tiba, harga jual salak tersebut akan meningkat. Masyarakat pun menginginkan agar hasil olahan komoditas salah mampu diolah dan di kemas dalam berbagai varian. Harapannya, ketika terjadi panen rayasalak maka masyarakat akan mendapatkan harga jual produk yang sangat bagus (Isnaini dkk, 2018).

Pada sisi lain, meskipun masyarakat di Kalurahan Bangunkerto sering mendapatkan berbagai pelatihan dari berbagai instansi terkait pengembangan UMKM, namun pelatihan tersebut masih menggunakan modal secara swadaya masyarakat untuk membangun UMKM olahan salak. Selain itu, masyarakat mengalami keterbatasan peralatan untuk mengolah salak menjadi camilan aneka rupa. Kemudian, masyarakat juga menemukan kendala untuk memperluas kesempatan dan melebarkan jaringan penjualan produknya.

Berdasarkan observasi pendahuluan, sejatinya, di Kalurahan Bangunkerto memiliki dua fokus utama yang dapat menjadi implementasi Akses Reforma Agraria yakni sektor UMKM olahan salak dan budidaya ikan air tawar. UMKM yang berfokus pada olahan salak di Kalurahan Bangunkerto berjumlah 4 kelompok yang masih aktif hingga saat ini. UMKM tersebut yaitu: UMKM Puspita, UMKM Family Ceria, UMKM Candi Mas, dan UMKM Griya Olah Salak. Selanjutnya UMKM pada sektor budidaya ikan air tawar memiliki 6 Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) yang masih aktif hingga saat ini. KPI tersebut yaitu: KPI Mina Gadung, KPI Mina Berkah, KPI Tunas Sejahtera, KPI Sebar Dadi, KPI Ulam Sari, KPI Mina Demanx.

Umumnya KPI tersebut membudidayakan jenis ikan konsumsi seperti nila, bawal, dan gurame. Hasil panen dari keenam kelompok yang terdaftar menjadi responden Program Penanganan Akses Reforma Agraria sebesar Rp 332.150.000,00 per satu kali masa panen dengan berat ikan 11,8 ton. Data tersebut dinilai bahwa Kalurahan Bangunkerto dapat menjadi potensi sebagai sentra pembudidaya ikan air tawar di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Kemudian, berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022, pelaku UMKM sektor kuliner Kalurahan Bangunkerto terdiri atas Kelompok Usaha Bersama sebanyak 12% dan mandiri (perorangan) sebanyak 88%. Berdasarkan laporan ARA tersebut juga ditemukan bahwa dari 200 KK telah memiliki penghasilan rata-rata per bulan yaitu Rp 1.693.000,00. Atau dengan kata lain, mereka memiliki penghasilan terendah Rp 115.000,00 dan penghasilan terbesar Rp 18.000.000,00. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Penanganan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kapanewon Turi memiliki daya tarik tersendiri dalam pengelolaan perikanan air tawar dan pengembangan potensi UMKM pada sektor perkebunan salak. Wilayah Bangunkerto telah dan sedang mendapatkan berbagai bantuan dari berbagai pihak dalam pengelolaan lahan serta pelatihan dari berbagai *stakeholder* termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan program unggulan ARA. Implementasi ARA dari sektor UMKM salak dan sektor perikanan juga sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan dua produktivitas tersebut. Namun masyarakat menghadapi tantangan baru mulai dari harga pellet ikan yang mahal dan jaringan pemasaran. Pada sisi lain masyarakat Kalurahan Bangunkerto mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap akses modal dan realisasi dari program yang telah dibangun. Sebab, masyarakat berinisiatif menggunakan modal usaha untuk mengembangkan produk olahan,

meremajakan varietas dan mendistribusikan ke pasar-daerah dan internasional. Berangkat dari masalah di atas, penulis akan memperjelas lebih detail dengan mengajukan beberapa pertanyaan pokok di bawah ini:

1. Apa dampak kegiatan akses reforma agraria yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi?
2. Apa kendala bagi masyarakat dalam mengimplementasikan pengembangan UMKM salak serta pengembangan di sektor perikanan pasca BPN memfasilitasi kegiatan ARA di Kalurahan Bangunkerto?
3. Bagaimana dan apa saja *role model* ARA yang dapat diterapkan di Kalurahan Bangunkerto ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Akses Reforma Agraria yang dilakukan oleh masyarakat di Kalurahan Bangunkerto setelah adanya program ARA yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya berkelanjutan dalam rangka implementasi Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto
3. Untuk meningkatkan fokus masyarakat dan menjadikan Kalurahan Bangunkerto menjadi sentra UMKM olahan salak dan perikanan air tawar serta potensi lain yang tersedia di kalurahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis, yaitu memberikan tambahan pengetahuan tentang hubungan antara implementasi Akses Reforma Agraria oleh masyarakat di Kalurahan Bangunkerto dan program akses reforma agraria;
2. Manfaat sosial yaitu menemukan adanya keberlanjutan kegiatan akses reforma agraria yang telah dilaksanakan di Kalurahan Bangunkerto;
3. Manfaat praktis, yaitu memperoleh masukan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam rangka menyusun kebijakan selanjutnya

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi Penanganan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto telah berjalan sesuai dengan target dari BPN dan masyarakat sangat antusias dengan adanya program ARA yang terdapat di Kalurahan Bangunkerto. Antusias tersebut disambut baik dengan perkembangan dari masyarakat yang tidak hanya ikut hegemoni ataupun *euphoria* saat ARA berlangsung tetapi masyarakat menjawab dengan memaksimalkan potensi yang terdapat di Kalurahan Bangunkerto baik di sektor Budidaya Perikanan maupun UMKM olahan salak. Dari hasil penelitian yang peneliti sajikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat merasakan dampak yang sangat positif dengan adanya program ARA yang diselenggarakan di Kalurahan Bangunkerto. Terjaminnya pasar Budidaya Perikanan serta UMKM olahan salak hingga masyarakat juga dapat menabung dengan adanya bantuan serta pelatihan yang diselenggarakan BPN serta pihak terkait yang bekerjasama dalam menyukseskan ARA di Kalurahan Bangunkerto. Kemampuan baik *skill* berdagang maupun *skill* dalam mempertahankan usaha agar tetap berjalan dan terus berlangsung hingga jangka waktu yang lama sangat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya berbagai pelatihan dan pendampingan dari BPN maupun *stakeholder* lainnya. Pelatihan yang dilaksanakan di Kalurahan Bangunkerto membuat masyarakat menjadi sadar bahwa usaha yang dilakukan saat ini baik UMKM olahan salak maupun Budidaya Perikanan dapat menjadi investasi jangka panjang hingga menjadi penjamin saat hari tua.
- 2) Pemberdayaan masyarakat otomatis didapatkan melalui program ARA karena masyarakat dipaksa untuk berpikir lebih maju sehingga tidak

mengalami stagnan dalam menjalani usaha tetapi terus berkembang dengan pendampingan berkelanjutan dari BPN serta pihak terkait. Gagasan baru juga telah dimiliki masyarakat dimana sangat merindukan Kalurahan Bangunkerto menjadi sentra Budidaya Perikanan serta menjadi sentra UMKM olahan salak, tidak hanya se Kapanewon Turi melainkan menjadi sentra di Kabupaten Sleman.

- 3) Pelestarian budaya serta menjaga nilai masyarakat agar hidup berdampingan dengan alam juga sangat melekat di hati masyarakat Kalurahan Bangunkerto terbukti dengan adanya berbagai acara kebudayaan desa yang diadakan rutin setiap tahunnya. Dengan *tagline* “*Warga Gumregah*” menjadi api di masyarakat untuk terus menjaga kelestarian budaya serta menjaga gotong royong dan semangat kebersamaan masyarakat Kalurahan Bangunkerto. Hal tersebut membuat program ARA dari BPN mudah meresap di masyarakat serta antusias masyarakat yang sangat tinggi membuat keberhasilan atau kesuksesan program ARA di Kalurahan Bangunkerto menjadi signifikan ke arah yang positif.

## **B. Saran**

Penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran yang bermanfaat guna kemajuan Kalurahan Bangunkerto pasca program Akses Reforma Agraria serta BPN sebagai pihak penyelenggara Akses Reforma Agraria sebagai berikut:

1. Penyuluhan maupun pendampingan mengenai modernisasi usaha harus terus dilaksanakan guna mengejar cita-cita masyarakat yang ingin menjadi simbol ataupun sentra dalam UMKM olahan salak maupun Budidaya Perikanan, karena dengan SDM yang memadai ataupun menguasai digitalisasi usaha akan cepat dalam melakukan pengembangan maupun sumbangan ide gagasan guna membuat UMKM maupun Budidaya Perikanan mendapatkan julukan sebagai sentra dalam usahanya.

2. Dalam organisasi masyarakat masih terdapat kekurangan SDM yang menjadi pemimpin maupun penggerak sehingga terlalu bergantung terhadap sosok yang tentunya akan kesulitan dalam menampung sekian banyak usulan maupun ide gagasan, diperlukan adanya regenerasi pengurus serta melibatkan SDM yang usianya lebih muda.

Bagi BPN:

1. Lebih mendetailkan kembali apa saja yang dibutuhkan masyarakat guna memaksimalkan potensi yang terdapat di masyarakat, karena tidak jarang masyarakat yang mengeluh tentang sulitnya untuk melakukan diskusi dengan BPN maupun pihak terkait untuk menyalurkan aspirasi.
2. Membantu melakukan pengkaderan bagi masyarakat penerima Akses Reforma Agraria sehingga dari hasil pengkaderan tersebut perwakilan masyarakat penerima akses dapat membantu sebagai penerjemah program apa yang akan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwisastra, J., Vintarno, J., & Sugandi, Y. S. (2019). Perkembangan penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan pertanian di Indonesia. *Responsive*, 1(3), 90–96.
- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2022). Model Proses Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Multi-Stakeholder Partnership. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 111–125. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.39418>
- Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, N. M. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 47–65.
- Ilmiah, J., & Muhammadiyah, U. (2022). *Sang pencerah*. 1159–1174. Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Ayubi, A. (2021). Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12 No. 1 Juni 2014.
- Creswell, Jhon W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J 2008, *Educational research. planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*, Pearson-Prentice Hall
- Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N.K., & Lincoln, YS. (Ed.). (2005). *The Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
- Herawati, Christina L, Akbar D. (2014) Potensi ota Bandung Sebagai Destinasi Incentive Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Epigram*, Vol.11 No.2 Oktober 2014:95-102
- Isnaini, L., Manumono, D., & Ambarsari, A. (2018). Keragaan dan Potensi Agribisnis Salak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Masepi*, 3(1), 87–112.
- Raco, JR 2010, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Schwandt, TA. (2000). Three Epistemological stances for qualitative Inquiry. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Ed.). *Handbook of qualitative research* (2nd ed. pp. 189-213). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Shafrina. (2022). Implementasi Access Reform pada kelompok pengolahan hasil ikan studi kasus : Kampung iwak kelurahan mentaos. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6943>
- Putra, A. H. (2018). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>

- Rizani, A. (2017). Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Subsektor. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 138–156.
- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170>
- Setiyo, U. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 204
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Wulan Pujiriyani, D. (2022). Jurnal Widya Bhumi Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan Dan Limitasinya. *Widya Bhumi*, 2(1), 39.
- Wiradi, G. (2009). Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Jakarta:KPA, Bogor: Sajogyo Institute, dan Bandung: Akatiga
- Yogyakarta, M. (n.d.). *Rintisan Usaha pada UMKM Sekarwangi Bangunsari melalui Pelatihan Inovasi Produk Olahan Lele*. 824–828.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008  
Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960  
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas